BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1. Sejarah PT. Pos Indonesia (Persero)

Berdasarkan Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Kantor Pos yang pertama kali didirikan yaitu di Batavia (Jakarta) pada tanggal 26 Agustus 1746, didirikan oleh Gubernur Jendral G.W. Baron Van Imhoff. Kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi ditandai dengan ditemukannya era baru di bidang telekomunikasi, bersamaan dengan itu berdiri pula Dinas Pos, Telegraph dan Telepon yang lebih dikenal dengan singkatan (Jawatan PTT) pada tahun 1906. Pada tahun 1922 sampai tahun 1923 kantor pusat PTT yang semula berkedudukan di *Weltreveden* (Gambir) mulai dipindahkan ke gedung *"Burgerlijke Openbare Werken" – BOW* (Dinas Pekerjaan Umum) di Bandung, dan pada tanggal 27 September 1945 terbentuklah Jawatan PTT-RI dan diperingati sebagai hari bhakti PTT dan kemudian menjadi hari bhakti Parpostel.

Dalam perkembangan selanjutnya, jawatan PTT sebagai perusahaan Negara bersumber pada IBW (*Indische Bedrijen Wet*) dinyatakan telah memenuhi syarat untuk menjadi Perusahaan Negara (PN) sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 tahun 1960, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 240 tahun 1961. Status Jawatan PTT diubah menjadi PN Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengiat lapangan kerja PN Postel yang mengalami perkembangan pesat, maka pada tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi dua Perusahaan Negara, yaitu PN Pos dan Giro berdasarkan PP

Nomor 29 dan PN Telekomunikasi berdasarkan PN Nomor 30 pada tahun yang sama.

Berdasarkan UU Nomor 9 tahun 1969, status BUMN ditetapkan menjadi Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum) dan Persero. Atas dasar itu PN Pos dan Giro diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro dengan PP Nomor 9 tahun 1978. Kemudian Perum Pos dan Giro secara resmi dialihkan statusnya menjadi Perusahaan Perseroan PT. Pos Indonesia (Persero). Dimana ketentuan Pos dan Giro menjadi Persero berdasarkan :

1. Pada tanggal 27 Februari 1995 di Jakarta ditetapkan PP Nomor 5 1995, tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Persero (PT. Pos Indonesia) yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa perposan yaitu : Pelayanan Komunikasi, Pelayanan Logistik, Pelayanan Keuangan, Pelayanan Ritel.
2. Akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana telah diubah dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 89 tanggal 21 September 1998 dan Nomor 111 tanggal 28 Oktober 1998.

Berkenaan dengan hal itu, maka dengan berpedoman pada keputusan Direktur PT. Pos Indonesia No. 138 / SDM / Dirut / Pos / 1995 tentang pemberlakuan selama masa transisi mengalami :

1. Struktur organisasi :
    a. Satuan pengawas intern, pusat-pusat, sub direktorat berikut jajarannya di kantor pusat.

b. Kantor-kantor wilayah usaha PT. Pos Indonesia.

c. Unit-unit pelaksana teknis, kecuali Kantor Pos dan Giro masih tetap berlaku.

2. Sebutan Kantor Pos dan Giro disesuaikan menjadi Kantor Pos.

3. Menunggu ketentuan tentang logo kertas surat dan cap jabatan, terutama digunakan untuk korespondensi ke luar organisasi hendaknya mencantumkan logo lama dan sebutan Perum Pos dan Giro supaya disesuaikan menjadi PT. Pos Indonesia (Persero).

4. Jalur Koordinasi ke dan dari Kantor Pos selama ini masih tetap berlaku, dengan menyesuaikan :

   a. Unit-unit kerja di bawah bekas Direktorat Niaga dialihkan ke Direktorat Pemasaran.

   b. Unit kerja di bawah bekas Direktorat Kepegawaian dan Tata Usaha serta Direktorat Perlengkapan dan pembangunan dialihkan ke Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana.

   c. Unit-unit kerja pada Direktorat lainnya tidak mengalami perubahan.

2.2. Visi dan Misi PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta

2.2.1. Visi PT. Pos Indonesia (Persero)

PT Pos Indonesia (Persero) adalah penyedia jasa pos bernilai tinggi dengan daya saing global.

2.2.2. Misi PT. Pos Indonesia (Persero)

PT. Pos Indonesia untuk jangka panjang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dengan didukung teknologi tepat guna dan sumber daya manusia profesional.
b. Menyediakan layanan komunikasi, logistik, transaksi keuangan dan layanan pos lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kepuasan pelanggan.
c. Mengembangkan usaha yang memiliki daya saing kuat baik di pasar domestik maupun pasar global.
d. Memberikan pelayanan untuk kemanfaatan umum yang menjangkau seluruh pelosok tanah air dengan perlakuan yang sama guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mempererat hubungan antar bangsa.

2.3 Nilai-nilai Budaya PT. Pos Indonesia (Persero)

Budaya perusahaan yang berlaku di PT. Pos Indonesia ini harus ditaati dan dianut oleh seluruh karyawan, sehingga akan membentuk nilai-nilai individu, sikap dan harapan ini dipengaruhi oleh budaya perusahaan dan dipengaruhi oleh lingkungan budaya masyarakat, yaitu budaya yang bersumber dari lingkungan dimana orang tersebut berasal.

Nilai-nilai budaya yang berllaku di PT. Pos Indonesia, adalah sebagai berikut :

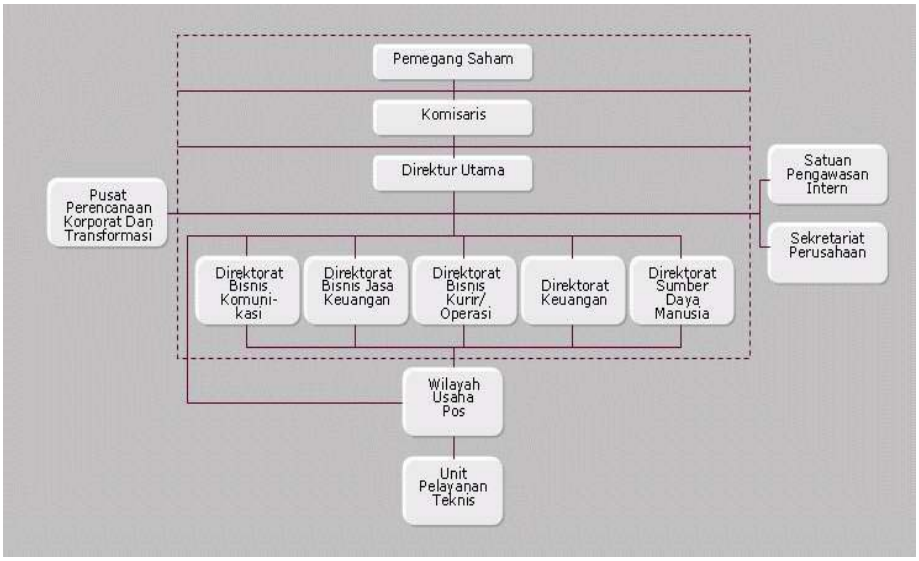
a. Berusaha mencapai yang terbaik.
b. Bertanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan.
c. Senantiasa melihat ke depan dan belajar dari pengalaman.

d. Ikatan yang lestari di antara seluruh jajaran, baik karyawan yang baru, yang sedang menjabat maupun sudah pension, terjalin baik di luar atau di dalam lingkungan kerja.

e. Bangga sebagai insane PT. Pos Indonesia.

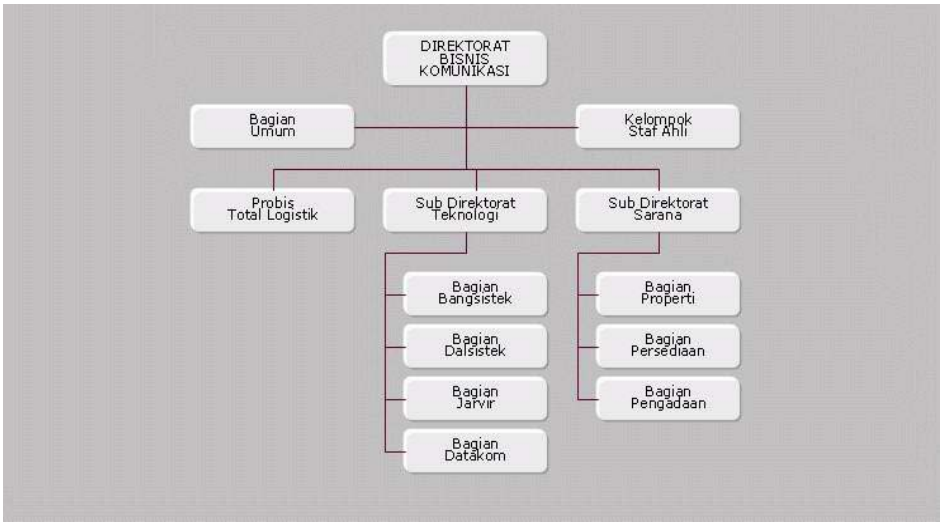
2.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) mengandung unsur dengan restrukturisasi pada organisasi tingkat pusat dan produktivitas pada tingkat unit pelaksanaan teknik. Susunan organisasi KP 2 Yogyakarta terdiri dari atas Pemegang Saham, Komisaris, Direktur Utama dengan bagian-bagian sub direktorat dibawahnya. Adapun gambar struktur organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1

Struktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero)



Gambar 2.2

Struktur Bisnis Komunikasi PT. Pos Indonesia (Persero)